ANALISIS JURNAL

"DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2014"

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Prodi : PGSD

Kelas : 2/F

Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.

2. Drs. Rapani, M.Pd.



Di susun oleh:

1. Nova Dwi Syafitri (2413053216)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

HASIL ANALISIS JURNAL

Jurnal ini menjelaskan tentang Pemilu Presiden 2019 bahwa demokrasi dalam Pemilu di Indonesia masih banyak masalah. Meskipun pemilu penting dalam negara demokrasi, kenyataannya pelaksanaannya belum sepenuhnya baik. Pilpres 2019 menunjukkan bahwa kita belum siap secara penuh menjalankan demokrasi yang sehat. Masalah partai politik, birokrasi yang tak netral, dan politisasi identitas membuat demokrasi kita jadi gaduh dan rawan konflik. Demokrasi di Indonesia masih fokus pada proses memilih, tapi belum benar-benar membuat rakyat percaya pada hasilnya atau menghadirkan pemimpin yang membawa kebaikan. Pilpres 2019 juga penuh dengan perpecahan, berita hoax, dan penggunaan agama untuk menarik dukungan. Selain itu, banyak pejabat dan aparat pemerintah dianggap tidak netral, serta partai politik tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti mendidik calon pemimpin yang layak. Untuk memperbaiki keadaan, semua pihak termasuk pemerintah, partai, dan masyarakat. Fsktanya perlu ada kerja sama, sikap jujur, adil, dan saling menghargai agar demokrasi kita bisa lebih baik dan membawa manfaat untuk rakyat.

BERIKUT ADALAH POIN YANG SAYA RANGKUM DARI JURNAL:

1. Demokrasi Belum Matang

- Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemilu, tapi demokrasi belum dijalankan dengan baik secara **substantif**.
- Demokrasi kita masih fokus pada proses (misalnya sekadar memilih), tapi belum menjamin kualitas pemimpin dan kepercayaan masyarakat.

2. Pilpres 2019 Penuh Konflik

- Pilpres ini menimbulkan **kerusuhan**, ketegangan sosial, dan saling tuduh antara dua kubu capres.
- Mahkamah Konstitusi (MK) terpaksa turun tangan karena kedua kubu mengklaim menang.

3. Politisasi Agama dan Identitas

- Kampanye banyak menggunakan isu agama dan perbedaan identitas (misalnya: SARA) untuk menarik pemilih.
- Ini memperparah **perpecahan sosial** dan memicu konflik.

4. Partai Politik Gagal Jalankan Fungsi

- Banyak partai tidak serius membina kader, bahkan mencalonkan artis hanya untuk mencari suara.
- Akibatnya, rakyat tidak merasa wakil mereka benar-benar mewakili suara rakyat.

5. Netralitas Birokrasi Dipertanyakan

- Banyak pejabat dan aparat pemerintah diduga tidak netral, ikut kampanye untuk salah satu calon.
- Ini membuat publik ragu akan keadilan pemilu.

6. Demokrasi Tanpa Substansi

- Demokrasi seharusnya bukan hanya soal pemilu, tapi juga soal **keadilan**, **transparansi**, **partisipasi nyata masyarakat**, dan **kepercayaan publik**.
- Kalau hanya prosedural, rakyat jadi kecewa dan mudah terjadi konflik.